

Kronologis Investasi Merusak Dusun Pala serta Intimidasi Aparat Brimob Penjaga Perusahaan Kayu PT. Arfak Indra di Wilayah Adat Suku Mbaham Matta Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat



Laporan Wenan Weripang dari Fakfak

Januari 2015:

Agenda: Penandatanganan Kesepakatan Kerja atau Persetujuan “Oknum” yang mengatasnamakan Warga terhadap rencana kegiatan perusahaan

Bertempat di Kantor PT. Hanurata Unit IIB, Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wagom, Fakfak Papua Barat.

Pihak-pihak yang hadir:

Pihak Perusahaan : Kepala Perwakilan PT. Arfak Indra (Djunjun Djunaedi)

Pihak Kontraktor : Ronial

Marga Wanggabus : Martalus Wanggabus, Wempi Wanggabus

Marga Wagab : Stefanus Wagab, Hengki Wagab

Marga Patiran : Yohanes Patiran, Yahya Patiran, Metu Patiran

Deskripsi

PT. Arfak Indra melakukan penandatanganan semacam kesepakatan kerja atau kontrak kerja dengan beberapa marga sebagai pemilik hak tanah adat. Kesepakatan kerja sebagai legitimasi awal pihak perusahaan melakukan penebangan kayu log (Ijin Pengelolaan Kayu) di wilayah adat milik marga, diantaranya margaWanggabus, Patiran danWagab.

Pihak manajemen perusahaan tidak memanggil semua masyarakat dari marga-marga yang melakukan kesepakatan tetapi hanya memanggil beberapa orang (oknum) untuk melakukan kesepakatan di tempat yang disebutkan di atas.

Manajemen PT. Arfak Indra juga pernah mengajak marga Weripangsupaya melakukan kerjasama guna melakukan penebangan kayu di wilayah adat margaWeripang tetapi marga Weripang menolak melakukan penebangan hutan di wilayah adatnya karena margaWeripang menganggap Hutan adalah Tempat Leluhur mereka yang perlu dilestarikan, hutan sebagai sumber mata pecaharian kehidupan, bagi marga Weripang. Menghancurkan hutan samahalnya dengan menghancurkan nasib anak cucu.

Berpatokan pada sikap Dewan Adat Mbaham Matta yang telah menerapkan SASI ADAT atau KERAHERA (baca: Masyarakat Adat Mbaham Matta Sasi Adat Investasi di Bomberay) pada tanggal 10 Desember 2014 dengan tujuan melarang semua investasi curang diwilayah adat Mbaham Matta, sehingga marga Weripang mematuhi keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Adat tersebut.



Februari 2015

Agenda : Pendaratan Alat Berat milik perusahaan

Lokasi : Logpond Goras dan sekitarnya

Deskripsi

Setelah marga Wanggabus, Patiran dan Wagab melakukan kontrak, diawal bulan Februari 2015, perusahaan membawa alat berat, entah dari mana datangnya, ke *log pond* yang terletaknya didekat kampung Goras, Distrik Kokas, sehingga disebut *Log pond* Goras. Masyarakat yang tinggal di Kampung Goras; MBaham Ndandara, Wos, Waremu dan Metimber, kaget melihat pendaratan puluhan unit alat berat di *Log pond* Goras dan dimobilisasi ke areal penebangan. Psenalnya, tidak pernah dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat yang tinggal dikampung-kampung sekitar areal kerja perusahaan.

Harun Fuad, 37 tahun, warga Kampung MBaham Ndandara, melakukan pemalangan saat karyawan perusahaan membawa alat melewati tanah adat marga Fuad. Sdr. Harun

Fuad menuntut biaya penggunaan lahan tanah adatnya karena terkena dampak mobilisasi alat. Pihak perusahaan mendatangi kampung MBaham Ndandara dan bernegosiasi dengan Sdr. Harun Fuad dan bersedia memenuhi permintaan Sdr. Harun Fuad berupa uang tunai sejumlah Rp 30.000.000,00 (*terbilang*: Tiga Puluh Juta Rupiah). Palang akhirnya dibuka oleh Sdr. Harun.



Hari Senin dan Selasa (9 dan 10) Februari 2015

Deskripsi

Sebelum perusahaan melakukan aktifitas, beberapa tokoh masyarakat dipanggil oleh aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Kokas, Senin 9 Februari 2015, dengan tuduhan bahwa para tokoh ini melakukan pemalangan di areal kerja perusahaan. Beberapa tokoh yang dipanggil aparat Polsek Kokas ialah Bapak Lukas Muri (Ketua Baperkam Kampung MBaham Ndandara), Bapak Isak Muri (Sekretaris Kampung MBaham Ndandara), Bapak Duda Sirindin (Ketua RT 01 Kampung Goras) dan Bapak Abdulfat Sirindin (Kepala Kampung Goras/Kepala Marga Sirindin).

Anehnya, pertemuan tidak dilakukan di Kantor Polsek Kokas, sesuai pihak yang mengundang, tetapi pertemuan di Kantor PT. Hanurata Unit IIB, Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wagon, Fakfak, tempat tinggal para pekerja perusahaan kayu ini, pada Hari/Tanggal, Selasa 10 Februari 2015.

Hal yang sangat tidak masuk akal sehat ialah tuduhan pemanggilan terhadap para tokoh ini, tapi sebenarnya para tokoh ini tidak melakukan aksi pemalangan. Pada pertemuan ini, Kepala Polisi Sektor Kokas, mohon maaf dan mengatakan bahwa, "Kami hanya menjalankan perintah!"



Jumat 13 Februari 2015

Deskripsi

Bapak Yermias Temongmere, warga Kampung MBaham Ndandara, merasa khawatir dengan dusun Pala miliknya masuk dalam areal kerja penebangan, sehingga berinisiatif meninjau dusun. Saat sampai dilokasi dusun Pala, terlihat olehnya satu unit bulldoser sementara merangsek maju ke dalam areal kebun Pala miliknya itu.

Bermaksud menghampiri bulldoser tersebut untuk mengingatkan adanya pohon-pohon Pala, namun operator *buldoser* justru lari meninggalkan alat berat yang dioperasikannya. Bapak Yermias mengambil kunci *buldoser* yang ditinggal kabur sopir *buldoser* ini dan berjalan pulang ke kampung. Masih dalam perjalanan pulang ke rumah, seorang Manajer Perusahaan mendahului Bapak Yermias, tiba di kampung MBaham Ndandara.

Manajer perusahaan yang tidak diketahui namanya ini, menyampaikan kepada Bapak Lukas Muri (Ketua Baperkam Kampung MBaham Ndandara) tentang kejadian pengambilan kunci oleh Bapak Yermias Temongmere. Nadanya mengandung tuduhan tindakan pelanggaran oleh Bapak Yermias. Bapak Lukas Muri menyampaikan kepada manajer perusahaan itu bahwa Sdr. Yermias belum sampai dikampung, kemungkinan sementara dalam perjalanan pulang.

Manajer Perusahaan itu lalu mengendarai mobil sehingga lebih cepat tiba di kampung, dibanding Bapak Yermias yang berjalan kaki, melewati hutan-hutan sekitar demi menghindari aparat Brimob yang berjaga-jaga di *Base Camp* perusahaan atau sedang berpatroli di jalur jalan logging. Bapak Lukas berjanji kepada Manajer Perusahaan bahwa akan segera mengamankan kunci *buldoser* itu saat Bapak Yermias tiba nanti. Bapak Lukas meminta manajer Perusahaan itu agar kembali lagi pada sore harinya.

Ditunggu sampai petang dan malam hari itu, Manajer Perusahaan tak kunjung balik ke kampung. Pada keesokan harinya (Sabtu 14 Februari 2015), Manajer Perusahaan tiba di Kampung MBaham Ndandara dengan membawa pengawal yaitu dua anggota Polisi (Brimob). Saat tiba di Kampung MBaham Ndandara, di tengah jalan, seorang anggota Brimob Polisi berteriak-teriak menanyakan siapa yang mengambil kunci bulldoser.

Sikap teror dan intimidatif ini menyebabkan kepanikan diantara warga kampung. Ada warga yang bergegas mendatangi rumah Ketua Baperkam, Bapak Lukas Muri, dan menyampaikan ada anggota Brimob bersama Manajer Perusahaan datang mengambil kunci. Bapak Lukas keluar dari rumahnya menemui Manejer Perusahaan yang dikawal dua anggota Brimob itu, seraya bertanya, “Memangnya terjadi masalah apa sehingga aparat datang ke kampung membawa senjata api”?

Salah seorang anggota Brimob maju dan menjawab, “Kita datang kesini ambil kunci doser yang kemarin diambil.” Tanpa menggubris sikap anggota Brimob yang arogan dengan senjata api laras panjang, Bapak Lukas menyesalkan sikap Manajer Perusahaan yang datang membawa-bawa aparat Brimob, padahal telah diminta secara baik-baik, sehari sebelumnya, agar kembali pada sore hari untuk mengambil kunci *buldoser* itu.



Kesempatan adanya Manajer Perusahaan itu, dimanfaatkan Bapak Lukas, selaku Ketua Baperkam Kampung MBaham Nandara, walaupun di bawah todongan senjata api Brimob, untuk menjelaskan kekhawatiran Bapak Yermias, termasuk posisi dusun Pala milik Bapak Yermias yang merupakan batas tanah adat antara marga Wanggabus dan marga Weripang. Diingatkan, sejak awal mula, marga Weripang menolak pembabatan hutan oleh perusahaan kayu ini.

Namun, pihak perusahaan berupaya keras untuk membujuk marga Weripang agar menyetujui kegiatan mereka. Kemudian Manajer Perusahaan bersama-sama menemui Bapak Kamal Weripang (Kepala Kampung Kinam) dan Bapak Wenand Weripang (Kepala Marga Weripang).

Keduanya berdomisili di Kampung Kinam, namun Bapak Wenand sedang berada di kota Fakfak, sedangkan Bapak Kamal pergi ke Kampung Goras. Gagal menemui kedua tokoh ini di Kampung Kinam, diputuskan untuk mencari Bapak Kamal di Kampung Goras.

Kendaraan perusahaan yang mengangkut Bapak Lukas dan Bapak Yermias akhirnya tiba di *logpond* Goras. Untuk mencapai Kampung Goras, dapat menggunakan perahu, atau melewati jalan darat. Namun mobil perusahaan memilih arah ke *log pond* Goras, bukan langsung melewati jalan darat menuju Kampung Goras.



Tiba di *logpond* Goras, Bapak Lukas dan Bapak Yermias dikawal ketat anggota-anggota Brimob Polisi, bahkan saat dijamu makan siang pun tetap dikawal oleh anggota Brimob Polisi dengan senjata api lengkap selayaknya seorang penjahat.

Selang beberapa waktu kemudian, Manajer Perusahaan dengan kawalan anggota Brimob Polisi terhadap Bapak Lukas dan Bapak Yermias, akhirnya tiba di Kampung Goras, untuk menemui Bapak Kamal Weripang. Bapak Kamal Weripang singkat bertanya, “Apakah kamu datang kesini sudah minta izin kepada yang punya hak tanah adat?” Pertanyaan tersebut tak dijawab Manajer Perusahaan, sehingga pembicaraan berakhir.

Manajer Perusahaan dan anggota Brimob mengajak Bapak Lukas dan Bapak Yermias agar pulang ke *logpond* dan diantar ke kampung, namun Bapak Lukas dan Bapak

Yermias menolak ajakan itu karena merasakan dan mengamati gelagat anggota Brimob Polisi yang tampak begitu meneror. Akhirnya Bapak Lukas dan Bapak Yermias memilih berjalan kaki pulang ke Kampung MbahamNdandara, pada hari itu juga.

Sabtu 14 Februari 2015

Keluarga margaWagab melakukan pemalangan secara adat atau sasi diperempatan Jalan Trans Bomberai-Jalan Logging, sekitar 1 km dari Kampung MBaham Ndandara. Pemalangan dilakukan oleh Amos Wagab, Ruben Wagab dan Agus Wagab, dengan menulis “Marga Wagab yang Melakukan Pemalangan”.

Tak lama, anggota Brimob Polisi kelokasi dan membongkar Sasi Adat yang dipasang marga Wagab ini. Menurut adat istiadat suku Mbaham-Matta, tanda larangan yang disebut Sasi Adat hanya boleh dibuka oleh pihak yang melakukan sasi secara bersama-sama dengan pihak yang dipermasalahkan atau disengketakan. Tapi jika ada pihak lain yang membuka Sasi Adat, apalagi secara paksa tanpa memberitahukan (ijin) pada pihak yang melakukanSasi Adat, maka dapat dikenakan sanksi atau denda adat karena telah terjadi pelanggaran.



Sasi Adat juga berfungsi sebagai alat komunikasi antara warga masyarakat adat, sehingga akibat pemasangan tanda pada tempat tertentu menyebabkan pihak yang diberi tanda peringatan kemudian berupaya mencari pihak yang memasang tanda sasi ini, agar dapat bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah.

Palang Sasi Adat yang dilakukan marga Wagab disebabkan kesepakatan kerjasama yang dilakukan pihak perusahaan dengan marga Wagab tidak melibatkan semua keluarga, tetapi pihak perusahaan hanya mengundang beberapa orang (oknum) yang kemudian menandatangani persetujuan kerja. Pihak perusahaan dan Polisi tidak tahu adat, sehingga bertindak sewenang-wenang dengan membongkar tanda Sasi Adat itu.

Minggu 15 Februari 2015

Rentetan kejadian yang mencemaskan warga suku Mbaham di Kampung Wabung atau MBaham Nandara dan Kampung Goras dan sekitarnya ini, kemudian dilaporkan kepada Dewan Adat Mbaham-Matta dan Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua Pos kontak Fakfak. Pimpinan Dewan Adat Mbaham-Matta dan ELSHAM Papua Pos kontak Fakfak melaporkan pengaduan masyarakat ini ke Polres Fakfak.

Bermaksud menemui Kapolres Fakfak, namun hanya dapat berdiskusi dengan wakilnya. Dalam pertemuan tersebut, Wakapolres Fakfak, Kompol Adolf Silvester Marsyom, menyatakan kesediaannya akan kelokasi perusahaan untuk melihat secara langsung keberadaan anggota-anggota Brimob.

Kamis 19 Februari 2015

Wakapolres Fakfak, Kompol Adolf Silvester Marsyom, mendatangi *Base Camp* perusahaan dan melakukan *briefing* terhadap anggota Brimob agar tidak lagi melakukan tindakan arogan terhadap rakyat.

Jumat 20 Februari 2015

Esoknya, perwakilan masyarakat adat dari kampung-kampung sekitar areal kerja PT. Arfak Indra, didampingi pimpinan Dewan Adat Mbaham-Matta dan ELSHAM Papua Pos kontak Fakfak mengadukan permasalahan ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fakfak. Pengaduan ini bermaksud agar pihak DPRD Fakfak dapat menengahi persoalan yang terjadi antara Perusahaan dan kaki tangannya, warga yang setuju dan yang tidak setuju masuknya perusahaan ini. Setelah DPR mendengar aspirasi yang disampaikan, pimpinan dan anggota-anggota DPRD Fakfak yang hadir dalam pertemuan ini menyatakan bahwa akan turun kelapangan untuk meninjau aktifitas perusahaan. (Baca: DAP Mbaham Matta Tutup PT. Arfak Indra di Fakfak Tanah Papua)



Senin 2 Maret 2015

Bertempat Gedung Paripurna DPRD Fakfak, pertemuan ini dihadiri oleh masyarakat adat dari Kampung Mambuni-buni, Kiriawas-was, Kinam, Goras, Weremu, Woos dan Mitember. Hadir pula marga Wanggabus, Wagab dan Patiran yang sudah melakukan kesepakatan kerja dengan pihak perusahaan.

Anggota-anggota DPRD Fakfak yang hadir dan memimpin rapat ialah Samuel Hegemur, Samaun Hegemur, Soni Hegemur, Safi Yarkuran dan Edward Budiman Go. Beberapa pejabat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Fakfak, serta aparat Polres Fakfak juga hadir dalam pertemuan ini.

Pada pertemuan ini, Wakil Ketua DPRD Fakfak, Samuel Hegemur, memimpin rapat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat menyampaikan pendapatnya. Marga Weripang yang diwakili oleh Kamal Weripang dan Wenan Weripang menyatakan dengan tegas menolak perusahaan Arfak Indra melakukan penebangan kayu di wilayah adat Marga weripang.

Marga Weripang beranggapan bahwa hutan merupakan warisan dari nenek moyang yang perlu dilestarikan bukan dihancurkan demi kepentingan investasi, hutan merupakan tempat untuk mencari nafkah kehidupan, di hutan juga terdapat tempat-tempat keramat yang perlu dijaga. Disisi lain, kehancuran hutan mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerusakan ekosistem, dan banjir dan bencana alam lainnya.

Masyarakat dari marga Wagab menyampaikan tentang kronologis kesepakatan kerja, dimana perusahaan Arfak Indra tidak memanggil semua keluarga marga Wagab, tetapi Oki Wanggabus menelpon bapak Stepanus Wagab dan menyampaiakan perusahaan ada perlu sama bapak. Oleh karena, kesepakatan kerja yang dilakukan antara marga Wagab dengan perusahaan Arfak Indra tidak melibatkan semua marga Wagab dan tidak ada sosialisasi secara baik maka marga Wagab meminta kesepakatan kerja yang sudah dilakukan, segera dikembalikan ke marga Wagab.

Saudara Abuhari Wanggabus mewakili marga Wanggabus menyatakan menolak melakukan penebangan kayu di wilayah adat Wanggabus. Abuhari Wanggabus menolak karena kesepakatan yang dilakukan antara marga Wanggabus dan pihak perusahaan tidak melibatkan semua keluarga marga Wanggabus tetapi yang melakukan kesepakatan secara diam-diam oleh oknum tertentu. Di marga Patiran, mempertanyakan kehadiran anggota Brimob Polisi. (Baca: Ruang Hidup Orang Mbaham Matta di Tanah Papua)

Bapak Simon Hindom sebagai pengurus Dewan Adat Mbaham-Matta juga menyampaikan pendapat bahwa setia investor masuk bekerja di wilayah adat suku Mbaham-matta, sebelumnya harus terlebih dahulu lapor kepada Dewan Adat Mbaham-Matta. Bapak Simon menambahkan bahwa daerah ini bukan daerah operasi militer sehingga perusahaan Arfak Indra dengan semena-mena memanfaatkan aparat keamanan untuk menakut-nakuti rakyat.

Dalam pertemuan tersebut, Samuel Hegemur menyarankan kepada pihak perusahaan agar memperhatikan tentang tenaga kerja, dimana buruh yang bekerja di PT. Arfak Indra tidak ada buruh lokal dari Fakfak tetapi semua dari luar. Samuel Hegemur juga berbicara tentang keberadaan anggota Brimob. Samuel juga memberikan catatan khusus kepada perusahaan agar memperhatikan dokumen kesepakatan kerja, dalam dokumen kesepakatan kerjasama tersebut tidak tertulis tahun kesepakatan tetapi hanya tanggal dan bulan.

Hasil pertemuan tersebut menimbulkan pro dan kontra diantara masyarakat adat, sementara pihak DPRD Fakfak tidak mengambil keputusan tegas, tetapi hanya menyarankan kepada pihak perusahaan untuk melakukan komunikasi ulang dengan masyarakat adat.



Kamis 12 maret 2015

Bapak Salmon Tanggareri (Kepala suku baham) yang tinggal di kampung Weremu, pergi ke kampung Goras dengan motor bersama temannya. Letak kampung itu dipesisir pantai dan akses masuk kesana melewati jalan perusahaan logging. Sementara dalam perjalan ke kampung Goras mereka dibuntuti dari belakang oleh anggota Brimob yang mengendarai mobil perusahaan dengan membawa senjata lengkap dan menyuruh berhenti.

Bapak Salmon bersama temanyapun berhenti, anggota brimob yang di mobil melompat turun dan bertanya dengan nada intimidasi kepada temannya Bapak Salmon. "Orang yang kamu bawa ini siapa, asalnya dari kampung mana dan untuk apa masuk kesini" Temannya bapak Salmon menjawab, bapak ini dari kampung Goras sehingga dia pergi lihat keluarganya. Jawaban tersebut digubris aparat brimob sehingga anggota brimon tetap bertanya namun temannya bapak Salmon menyampaikan jawaban yang sama

dan anggota brimob kembali ke mobil lalu pergi mendahului mereka ke arah kamp yang terletak di km 5 atau nama tempatnya Ayoki.

Bapak kepala suku Baham bersama temannya sampai di Rufrufa atau *log pond* PT. Arfak Indra. Para anggota Brimob yang berhenti sebentar di KM 5 atau Ayoki bergegas mengikuti mereka dengan mobil. Sampai di *Log Pond* anggota brimob menghampiri bapak Salmon bersama temanya dan bertanya kepada temannya Bapak Salmon dengan nada intimidasi pula, bahwa orang ini kampungnya dimana, datang kesini untuk apa dan keperluan apa ke Goras? Temannya bapak Salmon menjawab pertanyaan brimob bahwa bapak ini dari kampung Goras tapi pihak aparat brimob tidak puas sehingga Anggota Brimob yang bertugas di sana tetap merasa keberatan mengulangi pertanyaan.

Senin 09 Maret 2015

Bapak Harun Fuad yang mengesek (sensor) kayu di dekat kampung Baham Ndandara didatangi oleh anggota brimob yang bertugas di PT. Arfak Indra “siapa yang memberikan ijin”, dan mengatakan tidak boleh mengesek kayu diwilayah ini, karena Daerah ini milik PT. HPH Arfah Indra.

Minggu 29 Maret 2015

Bapak Baharudin Mayombi yang berdomesili di kampung Baham Ndandara pergi mengesek kayu di sekitar Jl. Trans Bomberai. Dalam perjalanan ke lokasi gesek kayu, anggota Brimob datang dengan mobil dan menyampaikan kepada Baharudin Bahwa tidak boleh gesek kayu diareal ini, karena Hutan milik HPH PT. Arfak Inddra.

Rabu 1 April 2015

Masyarakat suku Mbaham Matta yang tergabung dalam Dewan Adat Suku (DAS) melakukan demonstrasi ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Fakfak. Aksi dimulai sekita pukul 10:00 waktu setempat, massa yang bergabung dalam aksi tersebut berjumlah 100 orang. Tuntutan dari masyakat “PT.Arfak Indra Di Tutup! Sampai di gedung DPRD Fakfak pukul 12:30, beberapa massa aksi melakukan orasi tentang pentingnya menyelamatkan hutan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, diantaranya Ibu Wihelmina Wow, Safi Yarkuran dan Karim Weretma keluar menemui massa aksi dan disuruh masuk kedalam gedung pertemuan. Sementara anggota DPRD yang lain tidak berada dikantor. Mmassa menuntut ketiga anggota DPRD memanggil anggota yang lain dan juga Bupati.

Ibu Wihelmina, Pak Safi dan Karim berusaha menemui anggota yang lain dan Bupati, sekitar jam 16:00 mereka balik ke kantor dan menemui massa. Mereka menyampaikan kepada massa aksi bahwa rekanya di dewan tidak bisa hadir karena sementara reses

dan Bupati Fakfak menyampaikan bahwa akan dibentuk tim untuk menginvestigasi persoalan yang terjadi di PT. Arfak Indra.

Hasil yang disampaikan oleh anggota DPRD tidak memuaskan massa, sehingga massa aksi sedikit marah tapi akhirnya tenang dan berjalan kaki dari kantor DPRD Fakfak pulang ke kantor Dewan Adat Mbaham Matta yang terletak di Jl. Salasa Namudat.

Jumat 3 April 2015

Masyarakat adat Mbaham Matta ke lokasi perusahaan dan melakukan sasi adat di perempatan Jl. Trans Bomberai dekat kampung Baham Ndandara. Tindakan ini dilakukan karena masyarakat adat tidak puas dengan tanggapan wakil rakyat maupun pemerintah terhadap persoalan yang terjadi.

Setelah masyarakat melakukan sasi adat dan ke kampung Baham Ndandara, manajer perusahaan bersama dengan anggota brimob datang kekampung Baham menemui masyarakat dan ketua Dewan Adat Mbaham Matta, Zirzet Gwas Gwas. Pada pertemuan tersebut manejer perusahaan tidak turun dari mobil tapi komandan brimob yang mewakili perusahaan menemui masyarakat bersama Pak ketua Dewan Adat. Danpos brimob yang mewakili perusahaan menanyakan kepada ketua DAP Mbaham Matta (Bpk Zirzet Gwas Gwas) apakah kita masih bekerja atau tidak? Pak Zirzet dengan tegas Mengatakan bahwa "Perusahaan Hari ini juga ditutup".



Sabtu 4 April 2015

Tim dari pemerintah, DPRD, Dewan Adat bersama aparat keamanan TNI dan Polri melakukan investigasi ke lokasi perusahaan. Sampai di lokasi mereka mengajak salah satu perwakilan dari masyarakat meninjau lokasi kerja, tim yang melakukan investigasi tidak masuk ke semua dusun pala yang rusak tetapi hanya sampai di satu dusun dan pulang ke kamp perusahaan. Ironisnya Sampai saat tindak lanjut dari tim ini tidak jelas hasilnya.

8 April 2015

Aparat brimob mendatangi operator senso yang disewa bapak Kamal Weripang, Dahlan Weripang, Yusup Weripang, Salim Weripang dan Musa Weripang. Brimob tersebut larang mereka agar tidak boleh mengesek kayu disini karena menurut aparat brimob, hutan ini adalah milik HPH Arfak Indra sehingga masyarakat tidak boleh gesek kayu dan mengancam apabila ada masyarakat masih gesek kayu maka 'resiko tanggung sendiri'. Padahal wilayah itu adalah Hak Tanah Adat Marga Weripang dari leluhur mereka.

Anggota brimob juga masuk kedalam lokasi dan melakukan dokumentasi atau memotret tunggul-tunggul kayu yang sudah di tebang.